



PENGUKURAN PENDAPATAN PEMDA GREEN TRANSPORTASI DAN GREEN CITY DENGAN PENDEKATAN PERTUMBUHAN DAN INDEK, SIAPA YANG LEBIH BAIK?

Abu Bakar

Institute Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, abubakar00012248@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sumber pendapatan daerah di dua kabupaten berbasis wisata dan berbasis industri dalam waktu lima tahun dengan mengambil sampel Pemda Bandung dan Pemda Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis performa pendapatan daerah masing-masing, mengetahui dan meneliti perbedaan pendapatan daerah masing-masing dari sisi pertumbuhan dan mengetahui dan menganalisis perbandingan pendapatan daerah dari sisi perkembangan indeks pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performa pertumbuhan pendapatan secara nominal Pemda Surabaya jauh lebih besar, tetapi secara rasio pertumbuhan yang lebih kecil dari pada Pemda Bandung sebesar 124,5% berbanding 117,3%. Berdasarkan bobot dan penilaian menunjukkan sumber pendapatan Pemda Bandung memiliki bobot penilaian yang lebih baik dari pada Pemda Surabaya secara parsial tetapi secara agregat Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung dengan skor masing masing sebesar 10,5 dan 11,5. Dan berdasarkan indeks menunjukkan pertumbuhan Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung dengan hasil indeks menunjukkan 13 dan 7.

Kata Kunci : Analisa Laporan Keuangan, Indeks, Pendapatan Daerah

ABSTRACT

This study aims to compare the sources of regional income in two tourism-based and industry-based districts within five years by taking samples from the Bandung Regional Government and the Surabaya Regional Government. The purpose of this study is to find out and analyze the performance of each regional income, to find out and examine the differences in regional income from the perspective of the organization and to find out and analyze the comparison of regional income in terms of the development of the regional income index. This study uses financial statement analysis techniques. The results of this study indicate that the nominal revenue growth performance of the Surabaya Regional Government is much larger, but the growth ratio is smaller than that of the Bandung Regional Government of 124.5% compared to 117.3%. Based on the weights and assessments, the Bandung Regional Government has a better assessment weight than the Surabaya Regional Government as a party but in aggregate the Surabaya Regional Government is better than the Bandung Regional Government with scores of 10.5 and 11.5, respectively. And based on the index shows the growth of the Surabaya local government is better than the Bandung local government with the index results showing 13 and 7.

Keywords : Financial Statement Analysis, Index, Regional Income

Naskah diterima : 03-06-2022, Naskah dipublikasikan : 30-09-2022



PENDAHULUAN

Kota Surabaya adalah kota yang potensial untuk investasi karena akses pelabuhan dan infrastruktur jalan yang baik, lokasi geografis yang strategis. (Zenda and Suparno 2017, 378) dengan daratan 326,81 km dan lautan seluas 190,39 km serta 31 kecamatan yang terbagi dalam 4 bagian wilayah yakni Surabaya pusat Surabaya utara dan *Surabaya timur*. (Fahad Ainun Saleha, Aris Soelistyaa, n.d., 121) Kota Surabaya adalah yang pada tahun 2017, oleh *United Nation Environment Program* (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk program lingkungan) ditetapkan sebagai kota terbaik bersama Kota Mannheim (Jerman) dan Zhejiang Province (China) untuk kategori “Global Green City” (Andina 2019, 120) dan kota yang banyak memiliki tempat wisata dan kuliner. (Kholilah and Iramani 2013, 78)

Kota Bandung merupakan pelopor daerah lain dalam hubungan luar negeri dan sejak tahun 1960, telah menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunschweig di Jerman. (Dermawan, Akim, and Primawanti 2020, 184) UNESCO menetapkan sebagai kota wisata dan dikenal sebagai Paris Van Java, (Gurung 2010) kota yang dianggap paling mungkin mengembangkan wisata halal selain 14 kota lainnya di Indonesia. (S. R. Pratiwi, Dida, and Sjafirah 2018, 80) Kota Bandung yang dikenal dengan sejuta kuliner (Syarifuddin, M. Noor, and Rohendi 2017, 57) saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi destinasi wisata halal yang unggul. (S. R. Pratiwi, Dida, and Sjafirah 2018, 81)

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah memberikan keluasaan bagi daerah untuk otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah masing-masing. (Kusnandar and Siswanto 2018, 1) Prinsip otonomi daerah adalah (1) dilaksanakan dan memperhatikan mulai aspek demokrasi hingga memperhatikan potensi keanekaragaman daerah; (2) berdasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; (3) daerah kabupaten dan daerah kota otonomi secara luas, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas; (4) sesuai dengan konstitusi negara, (5) meningkatkan kemandirian daerah otonom (6) meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, (7) kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. (Rinaldi 2012, 106) Otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah mencari sumber keuangan berasal dari pendapatan asli daerah. (Akbar 2016, 35) Daerah dianggap mampu melakukan otonomi daerah salah satunya kemandirian keuangan daerah. (Dana, Khusus, and Nur, n.d., 109) Surabaya dan Bandung adalah dua daerah yang berbeda yang harus menggali berbagai macam sumber pembiayaan daerah dan biasanya pendapatan asli daerah pemda sebagai kota industri akan berbeda dengan kota yang mengandalkan pariwisata. Penelitian ini mencoba mengetahui dan memahami profile pendapatan Pemda Bandung dan Pemda Surabaya yang memiliki karakter daerah berbeda dengan pendekatan pertumbuhan dan indek perkembangan. Oleh karenanya pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) bagaimana Profile pendapatan daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya 2) pemda manakah yang lebih baik bial diukur dari sisi pertumbuhan pendapatan daerah. 3) Apakah Pemda Bandung memiliki posisi yang lebih baik daripada Pemda Surabaya ditinjau dari sisi indek perkembangan pendapatan daerah?

KAJIAN LITERATUR

Analisa Keuangan

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabilitas. (Kustianingsih, Muslimin, and Kahar 2018, 82) Laporan keuangan adalah laporan berisi informasi kinerja keuangan pada periode tertentu serta posisi kekayaan, hutang dan modal perusahaan



pada waktu tertentu (Laksono et al. 2020, 160) dan merupakan dari proses akuntansi (Bakar 2022, 54) yang disajikan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Rini and Amelia 2022, 14) yang disajikan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". (Noveliza, Rina, and Dhamayanti 2022, 2)

Oleh karenanya informasi keuangan pemma perlu dinilai dan di analisis dan dapat diandalkan. Salah satu alat analisa adalah analisa rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur dimana kondisi kesehatan *keuangan* (Mayasari, Kampono Imam Yulianto 2022, 19). Rasio keuangan (*Financial Ratio Analysis*) merupakan "kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya" (Denny 2018, 14). Analisa keuangan pada intinya adalah membandingkan antara angka tertentu dengan angka lainnya (Hasibuan, Muhammad, and WahabSamad 2022, 34)(Tristanto and Fatwara 2021) dan bentuk penulisan ulang ke dalam format komparatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan (Harisman, Muhammad 2022) yang sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan (Rudiwanto 2021, 77) dan sebagai tolak ukur kesehatan keuangan. (Mayasari, Kampono Imam Yulianto 2022, 19)

Tujuan analisis tersebut untuk memperoleh informasi terkait dengan posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan (Suyono et al. 2017) (Riesmiyantiningtias and Siagian 2020). Tujuan dilakukan analisa laporan keuangan adalah untuk mengetahui 1) posisi keuangan periode tertentu, 2) kelemahan dan kekurangan. 3) kekuatan 4) langkah perbaikan yang dilakukan, 5) penilaian kinerja manajemen 6). perbandingan perusahaan sejenis.(Denny 2018, 15) Sementara tujuan laporan keuangan pemerintah daerah menurut SAP adalah menyediakan informasi tentang 1) posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas pemerintah 2) perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah, 3) sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, 4)ketaatan terhadap anggaran 5)cara entitas pela poran mendani aktivitasnya, 6) potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan 6) untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam penyajian pelaporan keuangan (Novtania Mokoginta, Linda Lambey 2017, 828) Teknik analisa laporan keuangan pada umumnya dilakukan dengan 1) perbandingan laporan keuangan 2) analisa tren, 2) analisa persentase per komponen (Common Size) 4) analisa sumber dan penggunaan dana 5) analisa sumber dan penggunaan kas, 6) analisa rasio, 7) analisa laba kotor 8) analisa titik impas (BEP) (Putranto 2018, 8)

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. (Kusnandar and Siswanto 2018, 2) Pendapatan daerah terlihat di APBD yang memiliki tiga unsur 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah dan 3)Pembiayaan Daerah. (Kusnandar and Siswanto 2018, 2) Pendapatan daerah atau sering disebut sebagai pendapatan yang diterima daerah dari daerah tersebut yang digali dan digunakan secara mandiri. (Surakhman, Djazuli, and Choiriyah 2019, 156) Pendapatan Asli Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Pendapatan Retribusi Daerah, 3) Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 4) dan lain-lain.(Rinaldi 2012, 108) Pendapat lain adalah terdiri dari tujuh komponen utama yaitu 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah; 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4). Lain-lain PAD Yang Sah;5). Dana *Perimbangan*; dan 6) Lain-lain *Pendapatan Daerah Yang Sah*.(Akbar 2016, 34) Dana Perimbangan terdiri dari 1) Dana Bagi Hasil, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak dan 3) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain – lain. Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Hadi and Saputri 2018, 185) termasuk juga laba BUMD dan penerimaan dari dinas-dinas. (Ahmad 2021, 23)



Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Penertian pajak daerah dapat disederhanakan sebagai kontribusi wajib orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan berlaku, yang mana imbalan yang diterima secara tidak langsung (Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan 2019, 111) mulai dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah dan Sarang hingga pajak Burung Walet (Akbar 2016, 36) dan Pajak Parkir. (Pangerapan and Wokas 2016, 736) Pajak Daerah merupakan bagian dari desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004. (Susanti and Fahlevi 2015, 445) Merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang prospek yang baik dan patut di kembangkan. (Wijaya and Sudiana 2016, 1387) Dan di pungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Hadi and Saputri 2018, 185) Retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian jasa atau pekerjaan atau pelayanan dari pemerintah daerah atau dari usaha badan milik daerah baik langsung ataupun tidak. (Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan 2019, 111) Keduanya biasanya pemberi kontribusi pendapatan yang luas dan nyata untuk pembangunan daerah (Riftiasari 2018, 2) dan seharusnya mampu membiayai belanja (Khafiyya, n.d., 13) pemerintah daerah (Kuncoro 2015, 2) serta merupakan upaya pusat dalam pemberian otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah. (Santoso 2014, 13)

Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Lain-Lain Yang Sah

Merupakan salah satu sumber PAD (Dana, Khusus, and Nur, n.d., 81) dalam penerimaan daerah dan dikelompokkan sebagai penerimaan non pajak. (Rusmita 2016, 242) Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah. (Adyatma and Oktaviani 2015, 107) Penerimaan keuntungan tersebut biasanya disebut sebagai deviden jika berbentuk Perseroan Terbatas atau Sisa Hasil Usaha (SHU) bisa dalam bentuk koperasi. Pada umumnya berbentuk perseroan terbatas karena aset tersebut harus dipisahkan dari kekayaan daerah (Rinaldi 2012, 108). Pembagian deviden biasa dikaitkan dengan laba yang diterima perusahaan. (Sukirni 2012, 4) Sementara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah menurut UU no. 32 tahun 2004, pasal 104 adalah hibah, dana darurat dan lain-lain yang ditetapkan pemerintah (Dana, Nur, , 82) yang dinilai sesuai nilai keawajarannya atau nilai pasar (Khafiyya, n.d., 13) biasanya berasal dari dua sumber dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat. Dalam negeri biasanya hibah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sumber dari dalam negeri biasanya hibah dari suatu badan, lembaga atau organisasi atau dari kelompok masyarakat atau perorangan (Dana, Khusus, and Nur, n.d., 82) (Y. Pratiwi and Pamungkas 2018, 65)

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak adalah pendanaan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Nisa 2017, 206) Bagi Hasil Pajak merupakan kelompok pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi berupa bagian daerah dari bagi hasil pajak (Y. Pratiwi and Pamungkas 2018, 65) dialokasikan ke daerah didasarkan prosentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah (Nisa 2017, 206) pelaksanaannya mengikuti PP No. 104/2000 tentang desentralisasi fiskal (Kuncoro 2015, 17) terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dari kabupaten, serta dari kota (Y. Pratiwi and Pamungkas 2018, 65).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 UU No.33 tahun 2004. (Puspitasari and Salisa 2017, 34) (Wahyuni and Supheni 2017, 189) Besarnya DAU

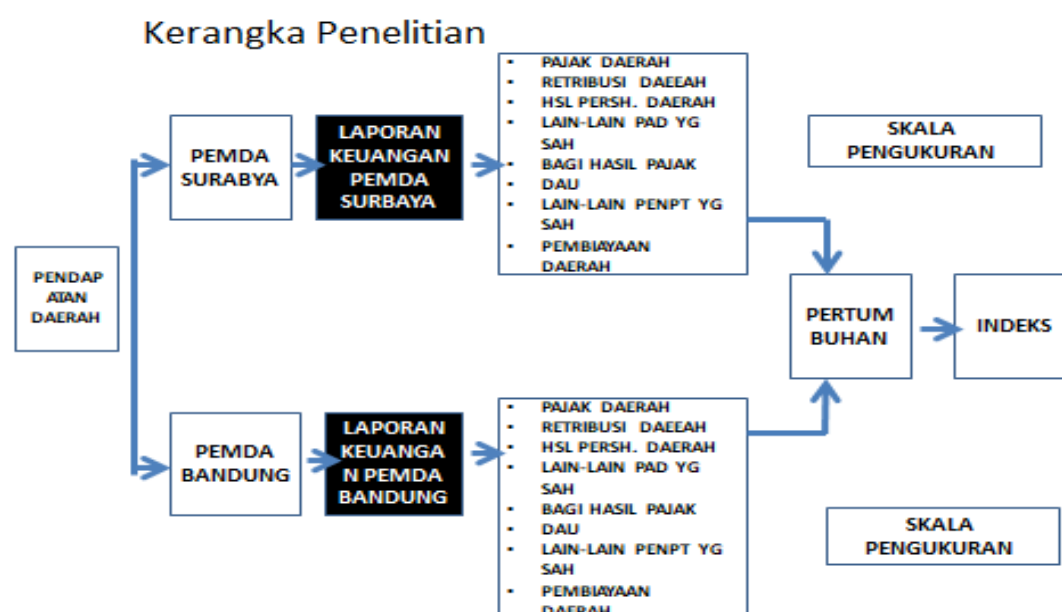
dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai penggajian PNS yang berlaku (Kusnandar and Siswanto 2018, 7) dan jumlahnya sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN (Susanti and Fahlevi 2015, 446) berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (Dana, Khusus, and Nur 79) dan penentuan besarnya didasarkan tas pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah sesuai dengan potensi daerah (Wahyuni and Supheni 2017, 190).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Susanti and Fahlevi 2015, 446) (Williantara and Budiasih 2016, 2049) menurut UU No. 32 Tahun 2004 (Kustianingsih, Muslimin, and Kahar 2018, 84) dan didasarkan pada kebijakan darurat sesuai dengan kriteria tertentu (Kustianingsih, Muslimin, and Kahar 2018, 89) untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar pelayanan pada masyarakat. (Ferdiansyah, Deviyanti, and Pattisahusiwa 2018, 45) Dengan kata lain Dana Alokasi khusus merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat karena tidak semua pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang sama. (Meianto, Betri, and Wenny 2013, 6) sebagai contoh Pemda Surabaya Memiliki PAD yang lebih besar daripada Pemda Bandung

KERANGKA PENELITIAN

Penelitian dimulai dari pengumpulan data primer. Data primer adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung dan Surabaya yang telah diaudit oleh BPK Provisis. Dari laporan keuangan di analisa delapan pendapatan daerah masing masing. Analisis tersebut menggunakan pendetan pertumbuhan dan pendekatan indeks. Hasil analisis pertumbuhan dan indeks selanjutnya diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan skla linker dan pembobotan



Gambar 1. Kerangka penelitian



METODE PENELITIAN

Alat Analisis

Penelitian ini merupakan bagian dari analisa laporan keuangan dimana analisa laporan keuangan pada umumnya 1) perbandingan laporan keuangan apakah antar tahun tertentu dengan tahun lainnya atau dengan entitas sejenis 2) Analisa tren 2) Analisa persentase per komponen (Common Size) 4). Analisa sumber dan penggunaan dana 5). Analisa sumber dan penggunaan kas 6) . Analisa rasio 7). Analisa laba kotor 8) Analisa titik impas (BEP) (Putranto 2018, 8). Penelitian ini adalah membandingkan dua entitas pemerintahan daerah dengan pendekatan tren dan indeks untuk pendapatan Pemda Surabaya sebagai green city dan Pemda Bandung sebagai kota dengan program Green Transportnya.

Pertumbuhan

Pertumbuhan pendapatan Pemerintah daerah adalah selisih antara pendapatan tahun sekarang dengan pendapatan tahun sebelumnya berbanding dengan pendapatan tahun sebelumnya dan bila disederhanakan menjadi

$$P = (PPt - PPt-1)/(PPt-1) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana

P = Pertumbuhan Pendapatan

PP = pertumbuhan pendapatan

t = tahun sekarang

t-1 = tahun sebelumnya

Trend Indek

Trend indek diukur dengan membagi pendapatan daerah tahun tertentu dengan pendapatan daerah tahun dasar sebagai tolak ukur. (Yuli Fitriyani, Putri Indiyati 2021, 3) Sehingga dapat diformulakan

$$Ti = Pt/Ptd \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Dimana

Ti = Trend indeks

Pt = Pendapatan daerah tahun tertentu

Ptd = Pendapatan daerah tahun dasar

Klasifikasi dan Pengukuran tergantungan Belaja Daerah

Klasifikasi ini dan pengukuran didasarkan pada skala linkerd sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu (Kurniati 2016, 1305), dan Rida Zuraid (Zuraida and Chie 2014, 1016) serta Yulianti (Yulianti and Silvy 2013, 63) dan dengan 5 tingkatan pembobotan, dimana nilai 1 memiliki bobot 1. 2 berbobot 2, 3 memiliki bobot 3, serta 4 berbobot 4 dan 5 berbobot 5. Bobot ini dikecualikan untuk DAU karena semakin kecil ketergantungan Benja Daerah pada DAU berarti semakin baik belanja daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah sehingga interval 1 memiliki bobot 5, 2 memiliki bobot 4, serta 3 memiliki bobot 3 dan 4 memiliki bobot 2 serta 5 memiliki bobot 1

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kinerja keuangan daerah dari sisi penerimaan daerah diperlihatkan sebagaimana di bawah ini

Tabel 1. Penelitian Pertumbuhan Keuangan Daerah

No	Peneliti	Tahun dan Pneribit	Tema	Variabel	Simpulan
1	I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto	GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007	Kinerja Keuanan Skala Indeks Kemampuan keuangan	kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah, namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi. Provinsi NTB berada pada skala indeks 0,54 selanjutnya diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan keuangan Tinggi
3	1.Yuli Fitriyani 2. Putri Indiyati 3.Karolina	Jurnal Humaniora Teknologi p-ISSN: 2443-1842 Volume 7, Nomor 1, Mei 2021	Analisis Trend Laporan Laba Rugi Pada Pt Austindo Nusantara Jaya Tbk Periode 2017-2019 Menggunakan Metode Angka Indeks	Ternd dan Indeks	laba rugi perusahaan pada tahun 2018-2019 mengalami kerugian disebabkan oleh selisih kurs mata uang asing dan beban pinjaman ke bank dalam bentuk mata uang asing
4	1.Nur Ilmi Octaviani, 2.Erry Sunarya2 , 3.Kokom Komariah	COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 3 Nomor 1, Desember 2019	analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode trend sebagai dasar menilai kondisi perusahaan	Tren	nilai pos tahun yang akan datang akan mengalami perkembangan yang berfluktuasi juga sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya.

PEMBAHASAN

Performan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan Pemda Bandung dan Surabaya tahun 2015 hingga 2019 memperlihatkan jumlah dan karakter yang tidak sama karena Pemda Bandung berbasis pariwisata sementara Pemda Surabaya berbasis Industri.

Dari tabel 2 (lampiran) dapat diketahui bahwa total penerimaan Pajak Daerah Pemda Bandung menunjukkan lebih kecil daripada jumlah yang diterima Pemda Surabaya. Penerimaan Pajak Daerah kota Bandung Rp 9,9 trilyun atau jika dirata-ratakan sebesar Rp 1,9 trilyun, sementara Pemda Surabaya sebesar Rp 17,1 trilyun dan jika dirata-ratakan tidak kurang Rp 3,4 trilyun pertahun. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata Pajak Daerah dalam waktu lima tahun memperlihatkan Pemda Bandung tumbuh 11,1% sementara Pemda Surabaya hanya 6,02% dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 40.4% dan terendah sebesar minus 10, 0% pada tahun 2017 sementara Pemda Surabaya terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 23,01% dan terendah pada tahun 2018 sebesar minus 6,67%.

Pendapatan Retribusi Daerah memperlihatkan pendapatan Pemda Bandung hanya 25% daripada Pendapatan Retribusi Daerah Pemda Surabaya. Jumlah pendapatan jenis ini hanya sebesar Rp 561,9 milyar untuk Pemda Bandung dan Pendapatan Retribusi Pemda Surabaya dalam waktu yang sama Rp 2,1 trilyun atau rata-rata Rp 435 milyar. Walaupun jumlah pendapatan jenis ini lebih rendah tetapi secara rata-rata pendapatan Pemda Bandung lebih dari 7 kali lipat atau 32,6% dari pada pendapatan Pemda Surabaya. Kenaikan pendapatan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 155,9% untuk Pemda Bandung sementara Pemda Surabaya hanya 34,69%.

Bagi Hasil Perusahaan Daerah menunjukan Pemda Surabaya lebih unggul dari pada Pemda Bandung masing-masing Rp 810 milyar dan Rp 49,8 milyar walaupun pertumbuhan tersebut dalam keadaan minus. Rata-rata jumlah bagi hasil untuk Pemda Surabaya sebesar minus 1,77%



dan Pemda Bandung minus 12,2%. Setiap tahun kedua pemda memperoleh bagi hasil dalam keadaan minus mulai dari minus 46,1% hingga minus 48,9% untuk Pemda Bandung yang berarti pendapatan bagi hasil dari perusahaan daerah semakin menurun dari tahun ketahun. Semetara Pemda Surabaya mengalami penurunan pendapatan bagi hasil mulai dari minus 7,7% hingga 0,0%. Dari data tersebut bisa dipahami bahwa penurunan pendapatan bagi hasil dari perusahaan daerah yang dimiliki Pemda Surabaya tidak setajam Pemda Bandung.

Tabel 2 (lampiran) memperlihatkan Pendapatan Lain-Lain yang Sah Pemda Surabaya 5,4 kali lipat lebih besar dari pada Pemda Bandung tetapi bila dikukur dari sisi pertumbuhan Pemda Bandung masih lebih baik dari pada Pemda Surabaya. Penyebab pertumbuhan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Pemda Bandung lebih tinggi disebabkan *pertama* pemda mengalami pertumbuhan diatas 10% sebanyak tiga kali sementara dan minus hanya dua kali. *Kedua*, kenaikan tertinggi sebesar 16% sementara Pemda Surabaya hanya 7.74%. *Ketiga* jumlah kenaikan dalam lima tahun sebanyak 12,4% sementara Pemda Surabaya hanya 1,0%. Dengan pakta ini bisa dipastikan total pendapatan daerah Pemda Bandung lebih tinggi dari pada pendapatan daerah Pemda Surabaya.

Bagi Hasil Pajak merupakan komponen yang cukup penting dalam penerimaan daerah. Dalam lima tahun kenaikan rata rata penerimaan jenis ini untuk Pemda Bandung sebesar 25,8%. Jumlah ini 2,5 kali lipat lebih besar daripada yang diterima Pemda Surabaya, tetapi secara nominal pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima Pemda Surabaya lebih besar. Jumlah tertinggi penerimaan tersebut untuk Pemda Bandung sebesar 82,1% yang terjadi pada tahun 2016 dan penerimaan terkecil sebesar minus 57% pada tahun 2018. Pemda Surabaya dalam waktu lima tahun pendapatan bagi Hasil Pajak sebesar 37,43% dan jika dirata-ratakan tidak lebih dari 9,36% yang artinya bagi hasil pajak dari provinsi atau dari pusat tidak sebesar penapadatan bagi hasil pajak Pemda Bandung.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Susanti and Fahlevi 2015, 446). Alokasi APBN ke Bandung dalam lima tahun Rp8,0 trilyun dan Pemda Surabaya Rp 6,0 Trilyun. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa Pemda Bandung memiliki ketergantungan lebih tinggi pada APBN dari pada Pemda Surabaya. Jumlah DAU terlihat semakin lama semakin besar dan total Penerimaan DAU dalam lima tahun menunjukan 30% untuk Pemda Bandung dan 19% untuk Pemda Surabaya. Penerimaan tersebut jika dirata-ratakan masing masing sebesar 7,5% dan 9,36% untuk Pemda Bandung dan Pemda Surabaya.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan pusat untuk kegiatan khusus yang ada di daerah (Susanti and Fahlevi 2015, 448). Pemerintah pusat memandang pembiayaan untuk DAK Pemda Bandung jumlah nominalnya lebih banyak dari pada Pemda Surabaya. Oleh karenanya Jumlah yang diberikan pusat dalam lima tahun sebanyak Rp Rp 1,6 trilyun atau Rp 325,9 milyar pertahun dan jumlah yang dialokasikan setiap tahun semakin besar mulai dari 17,7 milyar pada tahun 2015 hingga 437,1 milyar pada tahun 2019. Sementara Pemda Surabaya dalam lima tahun tidak kurang menerima Rp 1,45 trilyun atau Rp 291 milyar.

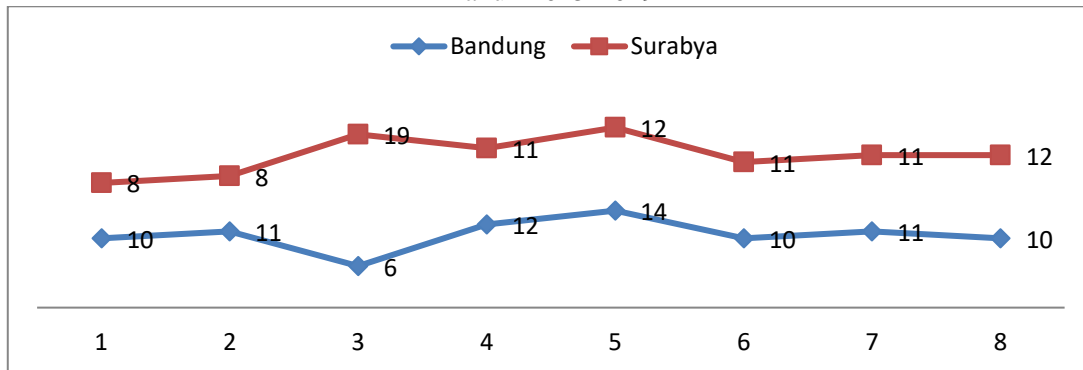
Lain-lain Pendapatan Yang Sah seperti hibah dari pemerintah maupun dari lembaga ataupun perorangan memperlihatkan jumlah yang diterima Pemda Bandung menerima lebih banyak dari pada Pemda Surabaya walaupun tidak signifikan. Pemda Surabaya dalam lima tahun menerima sebesar Rp 5,3 trilyun sementara Pemda Bandung sebesar Rp 5,9 trilyun. Dilihat dari sisi pertumbuhan dalam kurun waktu yang sama sebanyak 5% untuk Bandung atau 1,4% pertahun bila dirata-ratakan sementara Pemda Surabaya sebesar minus 10% yang disebabkan pertumbuhan pendapatan jenis ini dalam keadaan minus diatas 30% ditahun 2015 dan 2016

Pendapatan dari Pembiayaan Daerah Pemda Surabaya dalam lima tahun memperlihatkan jauh lebih besar dari pada Pemda Bandung. Masing-masing Rp 6,1 trilyun dan Rp 3,4 trilyun. Total Kenaikan pendapatan jenis ini secara rasio sebesar minus 101% untuk Pemda Bandung dan minus 72% untuk Pemda Surabaya atau bila dirata-ratakan masing-masing minus 25,3% dan minus 17,9%. Data tersebut memperlihatkan penerimaan dari Pembiayaan semakin meurun dari tahun ketahun dimana Pemda Bandung mengalami penurunan yang lebih besar dari pada Pemda Surabaya

Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Pemda Bandung dan Surabaya dalam waktu lima tahun memperlihatkan sebagaimana tebal 2 dilampiran yang memperlihatkan sebagaimana dibawah ini

Gambar 2. Bobot Penilaian Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemda Bandung dan Surabaya Tahun 2015-2019



Catatan, diolah sendiri dari laporan keuangan yang telah di audit, 1= pajak Daerah, 2=Retribusi Daerah, 3+Hasil Perusahaan Milik Daerah, 4 = lain-lan PAD yang sah, 5=bagi hasil pajak, 6= dana Alokasi Umum dan 7= lain lain pendapatan yang sah dan 8= Biaya Daerah

Pendapatan Pajak Lokal

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Pemda Bandung lebih baik 20,5% dari pada Pemda Surabaya walaupun secara nominal jumlah pendapatan Pajak Pemda Bandung tidak sampai 43%. Realitas tersebut menyebabkan jumlah bobot pertumbuhan Pemda Bandung lebih tinggi 2 point. Penyebab *kedua* adalah kenaikan pendapatan Pajak Pemda Bandung tumbuh 40,4% pada tahun 2017 dan 14,4% pada tahun 2016. Sementara Pendapatan Pajak Pemda Surabaya hanya tumbuh 23,01%. Penyebabnya adalah pendapatan Pemda mengalami pertumbuhan minus sebanyak dua kali minus 1% tidak sebagaimana pertumbuhan Pendapatan Pajak Lokal Pemda Surabaya yang tumbuh minus 6,6% pada tahun 2018

Pendapatan ritribusi daerah

Pertumbuhan pendapatan retribusi rata-rata Pemda Bandung dalam lima tahun sebanyak 130% sementara Pemda Surabaya yang hanya 17,5% walaupun secara nominal pendapatan Retribusi Pemda Surabaya hampir empat kali lipat dari pada pendapatan retribusi Pemda. Penyebab tingginya pendapatan retribusi Pemda Bandung disebabkan tahun 2017 tumbuh sebanyak 155,9% sementara Pemda Surabaya pada tahun yang sama hanya tumbuh 47,14%. Penyebab *kedua* pertumbuhan minus Pemda Surabaya cukup besar ditahun 2018 sebesar minus 34,7%. Dan ketiga rasio pertumbuhan Pemda Bandung lebih tinggi dari pada rasio pertumbuhan Pemda Surabaya. Bobot pertumbuhan memperlihatkan Pemda Bandung memiliki skor 11 sementara Pemda Bandung hanya 8. Penyebab tingginya bobot Pemda Bandung disebabkan pada tahun 2017 mendapat nilai pembobotan 5 sementara Pemda Surabaya pada tahun yang sama hanya memiliki skor 3.

Pendapatan Perusahaan Milik daerah

Pertumbuhan pendapatan yang berasal dari perusahaan milik daerah Pemda Surabaya jauh mengungguli Pemda Bandung masing masing Rp 820 milyar dan 49,8 milyar Total pertumbuhan Pendapatan jenis ini untuk Pemda Bandung dalam kurun waktu 5 tahun minus



49% sementara Pemda Surabaya Minus 7%. Penyebab rendahnya pendapatan jenis ini untuk Pemda Bandung disebabkan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 46% dan dua kali tidak mengalami kenaikan sama sekali. Oleh karenanya pembobotan pertumbuhan yang diperoleh Pemda Bandung hanya sepertiga dari Pemda Surabaya, Bobot keduanya 6 untuk Pemda Bandung dan 19 untuk Pemda Surabaya.

Lain-Lain PAD Yang Sah

Total Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemda Surabaya lebih dari dua kali lipat dari Pemda Bandung. Tetapi dari sisi pertumbuhan, pendapatan jenis ini yang diterima Pemda Bandung sebesar 12,4% dan 1% untuk Pemda Surabaya. Dalam waktu lima tahun Pendapatan Pemda Bandung secara nominal sebesar Rp 28,71 milyar dan Pemda Surabaya sebesar Rp 74,2 milyar. Bobot penilaian pertumbuhan memperlihatkan Pemda Bandung memperoleh 12 dan Pemda Surabaya sebesar 11. Penyebab besarnya bobot penilaian Pemda Bandung karena pada tahun 2016 memperoleh bobot pertumbuhan sebesar 5 dan tahun berikutnya 4 sementara pada waktu yang sama bobot pertumbuhan Pemda Surabaya hanya 4 dan 3.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak,

Pendapatan jenis ini merupakan salah satu dari pendapatan perimbangan pusat dan daerah. Dengan kata lain tidak didasarkan atas pendapatan murni yang bersumber dari kemampuan daerah. Dalam waktu lima tahun Pemda Bandung menerima Rp 1,2 trilyun dan Pemda Surabaya Rp 1,86 trilyun. Dari sisi pertumbuhan memperlihatkan Pemda Bandung memiliki bobot penilaian yang lebih tinggi dari pada Pemda Surabaya. Masing-masing 14 dan 12. Penyebab bobot penilaian Pemda Bandung lebih tinggi karena tahun 2019 memperoleh bobot 5 sementara Pemda Surabaya hanya 3. Atau secara prosentase memperlihatkan jumlah kenaikan tahun tersebut sebesar 69,6% sementara Pemda Surabaya hanya naik sebesar 21,3%

Pendapatan Dana Alokasi Umum,

Pendapatan ini juga merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN sebagai penyeimbang pengeluaran fiskal. Pemda yang baik adalah pemda yang memiliki struktur pendapatan yang rendah untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh karenanya semakin kecil semakin baik. Pemda Bandung memperoleh DAU sebesar Rp 8,0 trilyun dalam waktu lima tahun sementara Pemda Surabaya sebesar Rp 6,05 trilyun. Dari realita tersebut bisa dipastikan skor pertumbuhan Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung masing-masing 14 dan 12 atau secara bobot adalah berjumlah 11 dan 10 untuk Pemda Surabaya dan Pemda Bandung

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus bukan merupakan pendapatan asli daerah dan tidak ditentukan oleh kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sehingga tidak bisa dianggap sebagai sumber pendapatan termasuk pemberian bobot didalamnya tidak bisa dilakukan

Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan yang tidak masuk kedalam PAD lainnya dan tidak juga dalam kelompok pembangunan daerah. Hibah, pemberian dari berbagai pihak atau pendapatan yang tidak rutin adalah bagian dari pendapatan jenis ini. Data menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun Pemda Bandung memperoleh pendapatan jenis ini sebanyak Rp,5,9 trilyun dan Pemda Surabaya sebesar Rp 5,39 trilyun. Sehingga bobot penilaian kedua Pemda tidak berbeda, masing masing 11. Jumlah skor pertumbuhan setiap tahun juga tidak ada perbedaan setiap tahun

Pendapatan Pembiayaan Daerah

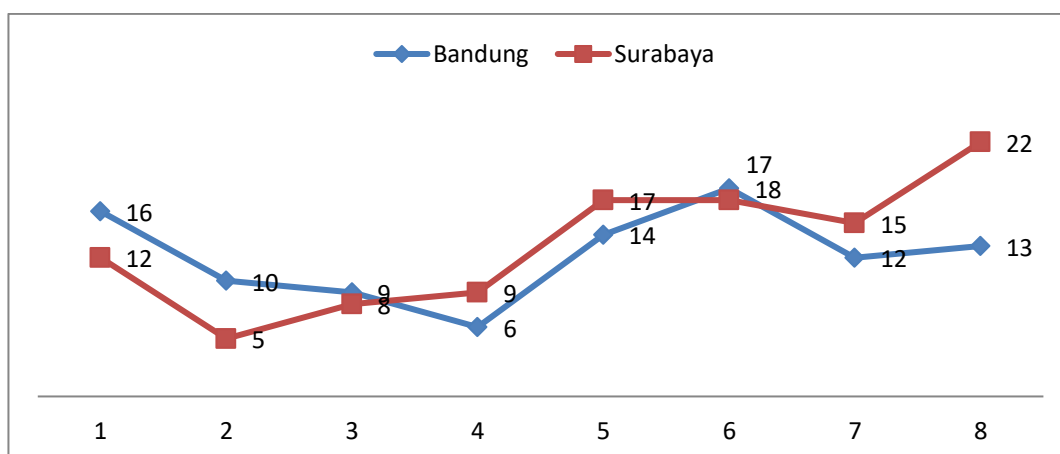
Pertumbuhan Pendapatan jenis ini dalam lima tahun minus 101% untuk Pemda Bandung dan minus 72% untuk Pemda Surabaya artinya Pendapatan Pemda Surabaya dari pembiayaan daerah masih lebih tinggi dari pada pendapatan Pemda Bandung sehingga bobot Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung masing-masing 12 berbanding 10. Penyebab rendahnya pendapatan jenis ini disebabkan Pemda Bandung mengalami pertumbuhan minus sebanyak tiga dimana minus sebesar 61,1% pada tahun 2019 dan terbesar kedua minus 34,2% pada tahun 2017

Penilaian kualitas pertumbuhan tidak mencerminkan sebenarnya karena 1) Pemda yang pendapatannya lebih kecil dari pada Pemda lain, pertumbuhan pendapatan yang kecil sudah cukup bisa menggambarkan pertumbuhan yang cukup besar dan bagi Pemda dengan pendapatan yang cukup besar, kenaikan yang cukup besar tidak menggambarkan pertumbuhan yang tinggi. 2) Kenaikan atau penurunan pendapatan Suatu Pemda tidak bisa dibandingkan antara kenaikan yang besar dengan kenaikan. Atas dasar dua alasan tersebut cara yang lebih mencerminkan yang sebenarnya dilakukan pengukuran menurut indeks pertumbuhan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Igede Prima dan Hery Susanto yang memberi kesimpulan bahwa kinerja Provinsi NTB tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah, namun berada pada kriteria tingkat kemampuan keuangan tinggi sebagaimana di alami Pemda Bandung yang memiliki pendapatan daerah jauh dibawah Pemda Surabaya tetapi memiliki rasio pertumbuhan yang tinggi. Penelitian ini tidak sejalan penelitian dari Yuli Fitriani yang menganggap trend terjadi karena disebabkan harga jual rata-rata stabil atau tidak mengalami penurunan (Yuli Fitriyani, Putri Indiyati 2021, 5)

Indeks Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Pemda

Untuk menutupi kelemahan pendekatan pertumbuhan dilakukan dengan pendekatan indeks. Pendekatan indeks dilakukan dengan menjadikan tahun tertentu sebagai tahun perbandingan dengan tahun berikutnya. Dalam penelitian ini, tahun 2015 dijadikan sebagai tahun dasar. Grafik dibawah ini merupakan hasil pembobotan terhadap perhitungan indeks sumber pendapatan daerah



Gambar 2, Bobor Indeks Pertumbuhan Pendapatan Daerah Skor Pemda Bandung dan Pemda Surabaya Tahun 2015-2019

Catatan, di olah dari laporan keuangan yang telah di audit, a= Bandung, b= Surabaya, 1 = Pendapatan Pajak daerah, 2= Pendapatan retribusi daerah, 3= Pendapatan hasil perusahaan milik daerah, 4=Pendapatan lain-lain PAD yang sah, 5 = Pendapatan Bagi hasil Pajak, 6= Dana Alokasi Umum, 7=lain-lain pendapatan yang sah dan 8=Pembangunan Daerah

Dari gambar diatas dapat indeks pertumbuhan pendapatan tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa pergerakan grafik berpluktuasi dinamis dimana pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, dan pendapatan hasil perusahaan mili daerah berada dibawah indeks pendaptan Pemda Bandung tetapi yang indeks pendapatan yang lain berada diatas indeks pendapatan Pemda Bandung. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan

1. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Pemda Bandung memiliki nilai skor yang lebih tinggi dari pada Pemda Surabaya masing-masing 16 dan 12. Tingginya nilai indeks Pemda Bandung disebabkan tahun 2015 sebesar 161% sehingga memperoleh nilai 5 atau 2 kali dengan nilai indeks 4. Sementara Pemda Surabaya hanya dua kali memiliki nilai 4 dan tidak pernah mendapat nilai 5.
2. Pendapatan Retribusi Daerah memperlihatkan Pemda Bandung lebih baik dua kali lipat daripada Pemda Surabaya. Bila Pemda Suabya memiliki total skor indeks pertumbuhan hanya 5 maka Pemda Bandung memiliki nilai 10. Penyebab Skor indeks adalah tahun 2017 Pemda Bandung mendapat penilaian 5 karena indeks Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 404% dan 2016 dengan skor sebesar 2. Atau 158%. Sementara Pemda Surabaya sepanjang llima tahun memiliki skor penilaian masing-masing hanya 1
3. Pemda Bandung pernah mengalami sekali stagnan pada tahun 2016 tetapi total penilaian indek Pendapatan Hasil Perusahaan Daerah Pemda Bandung masih diatas Pemda Surabaya walaupun tipis. Pemda Surabaya mmengalami pertumbuhan indeks yang baik hanya terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 4 sementara Pemda Bandung memiliki skor penilaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 5 dengan indeks pertumbuhan 232%
4. Pendapatan Lain-lain Yang Sah menunjukkan total skor penilaian untuk Pemda Surabaya lebih baik tiga digit dari pada Pemda Bandung disebabkan tahun 2016 memiliki penilaian tertinggi. Tahun tersebut indek pendaptan lain-lain Pemda Surabaya sebesar 991% atau naik hampir sepuluh kali lipat. Pemda Bandung hanya sekali mengalami indek pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 dengan indek 131%
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak antara Pusat dengan daerah memperlihatkan Pemda Surabaya yang berbasis industri dan jasa memperlihatkan jumlah penilaian pendapatan lebih baik dari pada Pemda Bandung. Penyebab penilaian indek Pemda Surabaya dikarenakan tahun 2016 indek menunjukkan 179%, dan 2017 sebesar 163% serta tahun 2018 sebesar 208%. Sementara Pemda Bandung hanya indek tertinggi di tahun 2016 dan 2017 masing-masing 182% dan 199%
6. Dana Alokasi Umum yang bersal dari APBN kedua Pemerintah Daerah hampir memiliki posisi penilaian indeks yang sama. masing-masing 18 dan 17 untuk Pemda Bandung dan Pemda Surabaya. Pemda Bandung hanya sekali mengalami indek yang rendah Sementara Pemda Surabaya tidak pernah mengalami indeks yang rendah
7. Lain-lain Pendapata Yang Sah memperlihatkan Pemda Surabaya memiliki indek yang lebih baik dari Pemda Bandung sehingga total skor penilaian sebesar 15 sementara Pemda Bandung hanya 12. Penyebab besarnya skor Pemda Surabaya pada tahun 2019 memiliki indek pertumbuhan sebesar 4 atau tumbuh 115%
8. Pertumbuhan pendapatan dari pembangunan daerah menunjukkan Pemda Surabaya jauh mengungguli Pemda Bandung. Masing-masing berjumlah 22 dan 13. Besarnya penilaian indeks Pemda Surabaya disebabkan Indeks mengalami pergerakan dari 81% hingga 108% sementara Pemda Bandung bergerak dari 19% hingga 100%. Realitas tersebut memperlihatkan penilaian indeks yang tinggi tidberbanding lurus dengan kenaikan indeks yang tinggi
9. Secara agregat, indeks pertumbuhan pendapatan memperlihatkan berjumlah 13 untuk Pemda Surabaya dan 7 untuk Pemda Bandung memperlihatkan pertumbuhan indek pendaatan daerah Pemda Surabaya masih lebih baik dari pada Pemda Bandung. Indeks rata-rata Pemda Surabaya 113% sementara Pemda Bandung hanya 105%. Indek rata rata tertinggi Pemda



Surabaya 290% untuk Pendapatan lain-lain yang sah. Indeks rata-rata tertinggi untuk Pemda Bandung sebesar 142% untuk pendapatan yang sama

Hasil penelitian diatas sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Nurilmi Oktviani dan Ery Sunarya yang berkesimpulan ditahun tahun mendatang masih akan terjadi fluktuasi sebagaimana ditahun tahun sebelumnya artinya Pemda Bandung dan Pemda Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Pendapatan daerah berbasis industri lebih tinggi dari pada pendapatan daerah berbasis pariwisata. Total Rasio pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun mulai dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta Pendapatan Pembiayaan Daerah Pemda Bandung menunjukan 11,1%, 130,5%, -minus 48,9% , 12,4%, 103,4%, 496,7% dan 5,5% serta minus 101,1%. Sementara ratio total pertumbuhan Green City untuk jenis pendapatan dan waktu yang sama adalah 24,1%, 17,5% , minus 7,1%, 1,0%, 37,4%, 10,1% dan minus 10,5%, serta minus 71,6%. Total kenaikan untuk ke delapan jenis penerimaan daerah tahun 2014-2019 menunjukan Pemerintah Pemda Surabaya lebih tinggi dari pada Pemda Bandung masing masing 43,6 trilyun rupiah dan 30,99 trilyun rupiah. Dari paparan diatas dapat disimpulkan sebagaimana terdapat empat model klasifikasi pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun yaitu 1) Pemda Bandung mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi secara parsial dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan Pemda Surabaya walaupun secara nominal jumlah pendapatan tersebut lebih kecil. 2) Pertumbuhan pendapatan Pemda Surabaya lebih tinggi dari pada Pemda Bandung dan secara nominal pendapatan tersebut lebih tinggi. 3) Pertumbuhan pendapatan kedua daerah memiliki skor penilaian yang sama walaupun secara nominal pertumbuhan Pemda Bandung lebih rendah. 4) Kenaikan secara Simultan menunjukan hasil yang berbeda dengan kenaikan secara parsial. Secara parsial pertumbuhan pendapatan lebih tinggi Pemda Bandung dari pada Pemda Surabaya dalam hal pertumbuhan Pendapatan Pajak daerah (10;8), retribusi daerah (11:8) , Lain-lain PAD yang sah (12:11, Bagi Hasil Pajak (14;12) walaupun secara nominal jumlah kenaikan pendapatan Pemda Surabaya lebih besar. Dan pertumbuhan yang dialami Pemda Surabaya lebih besar dari pada Pemda Bandung untuk pertumbuhan Bagi Hasil Perusahaan Milik Daerah (19:6), Dana Alokasi Umum (11:10) dan Pendapatan Pembiayaan Daerah (12:10). Pertumbuhan yang memiliki jumlah skor yang sama adalah lain-lain pendapatan yang sah (11:11). Secara agregat atau simultan pertumbuhan pendapatan Pemda Surabaya masih lebih baik dari pada Pemda Bandung dengan jumlah skor rata-rata 11,5 berbanding 10,5. Indeks pertumbuhan pendapatan tahun 2015-2019 dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis apakah menurut Jenis Pendapatan (indeks Pendapatan) atau melalui tahun pertahun (indek tahunan). Menurut jenis pendapatan dapat dikategorikan menjadi tiga klasifikasi yaitu 1) Skor pertumbuhan indeks Pemda Bandung lebih tinggi walaupun secara nominal jumlah pertumbuhan pendapatan Pemda Surabaya lebih tinggi, 2) Skor Indeks Pemda Surabaya lebih tinggi dari pada Pemda Bandung dan 3) Secara agregat pertumbuhan Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung. Skor Indeks secara parsial memperlihatkan pendapatan Pajak Daerah Pemda Bandung masih diatas Pemda Surabaya (16;12) begitu juga untuk Retribusi Daerah (10:5) dan Bagi Hasil Perusahaan Daerah (9:8). Klasifikasi kedua dimana indeks pertumbuhan pendapatan Pemda Surabaya Lebih baik dari pada Pemda Bandung terlihat dalam hal Lain-Lain PAD yang sah (9:6), bagi Hasil Pajak (17:14), Dana Alokasi Umum (15:12 dan Pendapatan Pembiayaan Daerah (22:13) Secara Agregat atau simultan memperlihatkan Skor Indeks Pemda Surabaya hampir dua kali lipat dari pada Pemda Bandung masing masing 13 berbanding 7. Indeks pertumbuhan dengan pendekatan pertahun (periode waktu) memperlihatkan dua kategori yaitu pertumbuhan



indek pendapatan Pemda Bandung Lebih baik dari pada Pemda Surabaya, Kedua Indeks pendapatan daerah Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung dan Indeks kedua daerah memiliki skor yang sama. Tahun 2016 Pemda Bandung memiliki indeks pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih baik dari pada Pemda Surabaya masing-masing 2:1 sementara tahun 2017, 2018 dan 2018, indeks pertumbuhan pendapatan Pemda Surabaya diatas pemda Bandung masing masing (3:2), (3:1) dan (5:1). Kategori *ketiga* terjadi pada tahun 2015 dimana skor indeks pertumbuhan masing-masing memiliki nilai yang sama (1:1)

REFERENSI

- Adyatma, Erdi, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 4 (2): 190–205.
- Ahmad, Srifatmawati. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Kota Makassar." *Journal.Lldikti9.Id/Ekonomika* 5 (1): 2685–6891.
- Akbar, Surya. 2016. "Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Jiaganis* 1 (1): 31–48.
- Andina, Elga. 2019. "Analisis Perilaku Pemilahan Sampah Di Kota Surabaya." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10 (2): 119–38. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1424>.
- Bakar, Abu. 2022. "Pemodelan Pengukuran Kinerja Pemda Dalam Menaikkan Pendapatan Pajak Dalam Perspektif Pendapatan Asli Daerah Kota Wisata Dan Kota Bisnis" 28 (1): 52–71.
- Dana, D A N, Alokasi Khusus, and Muhammad Nur. n.d. "Adek2," no. 2007.
- Denny, Erica. 2018. "Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk." *Jurnal Ecodemica* 2 (1): 12–20.
- Dermawan, Windy, Akim Akim, and Henike Primawanti. 2020. "Paradiplomasi Bandung Menuju Kota Wisata Halal." *Indonesian Perspective* 5 (2): 183–200. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.34133>.
- Fahad Ainun Saleha, Aris Soelistyaa, Hendra Kusuma. n.d. "Pengaruh Jumlah Usaha Dan Investasi Terhadap Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* Vol. 5, No (1): 118–27.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa. 2018. "Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah The Influence of Local Revenue , General Allocation Funds , Special Allocation Funds , and Balancing Funds on Regional Expenditure." *Inovasi* 14 (1): 44–52.
- Gurung, Jas Bahadur. 2010. "Insurance and Its Business in Nepal." *Journal of Nepalese Business Studies* 7 (1): 70–79. <https://doi.org/10.3126/jnbs.v7i1.6409>.
- Hadi, SenoSudarmono, and Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak



Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta.” *Jurnal BSI* 5 (2): 185–94.

Harisman, Muhammad, LM Nursalam. 2022. “ANALISIS PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI PEFINDO.” *Mediastima* 28 (1): 72–95.

Hasibuan, Ahmad Nurdin, Muhammad, and Abdul Wahab Samad. 2022. “Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan PT Karya Indo Selera Periode Tahun 2016-2020.” *Jurnal Binis Dan Manajemen* 2 (1): 30–53.

Khafiyya, Nida An. n.d. “Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.”

Kholilah, Naila Al, and Rr. Iramani. 2013. “Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya.” *Journal of Business and Banking* Volume 3, (1): 1, pages 69 – 80

Kuncoro, Haryo. 2015. “Fenomena Fly Paper Effect Pada Kinerja Keuangan,” no. June.

Kurniati, Ida Ayu Emmy. 2016. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 1290–1318.

Kusnandar, and Dodi Siswantoro. 2018. “Pengaruh Dana Alokasi.” *Beta Asteria*, 13–30.

Kustianingsih, Nurafni, Muslimin, and Abdul Kahar. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah.” *Katalogis* 6 (6): 82–91.

Laksono, Rudi, Dadan Sundara Ahmad Nurdin Hasibuan, Nova Permatasari, and Renny Saidih. 2020. “PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA IBI KOSGORO 1957 UNTUK PENINGKATANSKALA USAHA MUTIARA BUBBLE DI DEPOK.” *Teratai* 1 (2): 153–70.

Mayasari, Kampono Imam Yulianto, Sarah Dzakiyyah Nur. 2022. “Corporate Governance Profitability Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoide.” *Jurnal Blogchain* 2 (1): 17–24.

Meianto, Edy, Betri, and Cherrya Dhia Wenny. 2013. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan,” 1–13.

Nisa, Aulia Afafun. 2017. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1 (2): 203–14.

Noveliza, Devvy, Rina Rina, and Sylvia Kartika Dhamayanti. 2022. “Pengaruh Umur Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening.” *Blogchain* 2 (2): Penelitian menguji dan menganalisis



mengenai penga.

- Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan System Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualiotas Laporan Keuangan Pemerintahah." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 874–90.
- Pangerapan, Herly, and dan Heince R. N. Wokas. 2016. "Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber." *Jurnal EMBA* 4 (1): 732–41.
- Pratiwi, Soraya Ratna, Susanne Dida, and Nuryah Asri Sjafirah. 2018. "Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal Di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6 (1): 78. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>.
- Pratiwi, Yuri, and Bambang Pamungkas. 2018. "Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2 (1): 059–072. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.46>.
- Puspitasari, Arum, and Naila Rizki Salisa. 2017. "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016)." *Accounting Global Journal* 1 (1): 30–41.
- Putranto, Agung Tri. 2018. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt Mayora Indah Tbk Tangerang." *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 1 (3): 1–26. <https://doi.org/10.32493/skt.v1i3.1088>.
- Riesmiyantiningtias, Ninuk, and Ade Onny Siagian. 2020. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk." *Jurnal Akrab Juara* 5 (4): 244–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1297/1145>.
- Riftiasari, Dinar. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ----." *Jurnal AKRAB JUARA* 3 (3): 190–200.
- Rinaldi, Udin. 2012. "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *EKSOS* 8 (2): 105–13.
- Rini, Puspa, and Siti Amelia. 2022. "Pengaruh Asimetris Informasi, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba(Studi Empiris Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)." *Jabisi* 3 (1): 12–23. doi: <https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i1.402>.
- Rudiwanto, Andreas. 2021. "Langkah Bijak Berinvestasi Saham Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Rasio (Studi Kasus Pada Sektor Industri Barang Konsumsi)." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 2 (2): 72–84.
- Rusmita, Sari. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 5 (3): 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>.



- Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan, Patr. 2019. "Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 03 Tahun 2019* 19 (3).
- Santoso, Cahyo Budi. 2014. "Analisa Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2009-2013." *Jurnal Measurement Vol. 8 No.2 - Juni 2014 | ISSN : 2252-5394* 8.
- Sukirni, Dwi. 2012. "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividenden Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan." *Accounting Analysis Journal* 1 (2).
- Surakhman, A, Abid Djazuli, and Choiriyah. 2019. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang." *Kolegial* 7 (2): 150–66.
- Susanti, Susi, and Heru Fahlevi. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 (1): 189–91.
- Suyono, Joko, Agus Sukoco, M. Ikhsan Setiawan, S. Suhermin, and Robbi Rahim. 2017. "Impact of GDP Information Technology in Developing of Regional Central Business (Case 50 Airports IT City Development in Indonesia)." *Journal of Physics: Conference Series* 930 (1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/930/1/012045>.
- Syarifuddin, Didin, Chairul M. Noor, and Acep Rohendi. 2017. "Memaknai Kuliner Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata." *Abdimas* 1 (1): 4–8. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/abdimas>.
- Tristanto, Triyono Adi, and Medy Desma Fatwara. 2021. "Pengaruh Kinerja Keberlanjutan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Klaster Industri Jasa Keuangan)." *Mediastima* 27 (2): 140–52. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.301>.
- Wahyuni, Susanti Eka, and Indrian Supheni. 2017. "Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 15 (1): 1.
- Wijaya, Ida Bagus Agastya Brahmana, and I Ketut Suidiana. 2016. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5 (12): 1384–1407.



- Williantara, Gede Ferdi, and I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan* Vol.16. (3): 2044–70.
- Yuli Fitriyani, Putri Indiyati, Karolina. 2021. “Analisa Trend Laporan Laba Rugi Pada PT Austindo NusantarJaya TbkPeriode 2017- 2019 Menggunakan Metode Angka Indeks.” *Jurnal Humaniora Teknolog* 7 (1): 1–6.
- Yulianti, Norma, and Meliza Silvy. 2013. “Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya.” *Journal of Business and Banking* 3 (1): 57–68.
- Zenda, Rizki Herdian, and Suparno. 2017. “Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2 (1): 371–84.
- Zuraida, Rida, and Ho Hwi Chie. 2014. “PADA RESPONDEN DI INDONESIA” 5 (9): 1012–20.